

FISHERYPROGRESS.ORG

12 Mei, 2021

Salam Hormat Kami Pengguna FisheryProgress,

Hari ini menandai peluncuran Kebijakan Tanggungjawab Sosial dan Hak Asasi Manusia FisheryProgress, upaya tanggungjawab sosial pada sektor makanan laut (seafood) masih berada pada tahap awal pengembangan. Kebijakan ini merupakan titik awal yang kuat untuk membantu proyek peningkatan perikanan (FIPs) dalam meningkatkan performa sosialnya, dan untuk memberikan informasi penting bagi pembeli seafood guna mendukung persyaratan uji tuntas atau due diligence.

Kebijakan dan panduan pengkajian ulang menjelaskan apa saja yang akan dibutuhkan oleh FIP dalam membuat laporan pada FisheryProgress dan bagaimana tim kami akan mengevaluasi informasi yang FIP ajukan. Surat ini melengkapi dokumen tersebut dengan informasi mengenai proses yang kami ambil untuk pengembangan kebijakan, alasan untuk keputusan utama, dan rencana kami dalam mengevaluasi dan memperkuat kebijakan ini di masa mendatang.

Kami berkomitmen untuk mendukung FIP dalam memenuhi persyaratan baru ini

Sebagai wadah untuk upaya peningkatan perikanan, FisheryProgress memiliki tujuan untuk mendukung FIP agar mencapai kesuksesan dalam meningkatkan performa sosial dan lingkungan dalam kegiatan perikanan. Kami menyadari bahwa bagi kebanyakan FIPs, tanggungjawab sosial merupakan hal yang baru. Untuk itu, dalam berkoordinasi dengan Komunitas pelaksana FIP dan mitra-mitra lainnya, kami membuat kegiatan pelatihan dan sumber informasi yang menyeluruh untuk membantu FIP membangun kapasitas mereka dalam menerapkan persyaratan pada kebijakan kami.

Pada tahun pertama setelah kebijakan ini dikeluarkan, kami akan memberikan pelatihan intensif dan, jika memungkinkan, dukungan keuangan bagi FIP yang memilih untuk menerapkan kebijakan ini kedepannya guna memenuhi jatuh tempo. Kami akan menggunakan tahun pertama sebagai masa uji coba (pilot) untuk menguji keefektifan dan pelaksanaan kebijakan ini. Kami memperkirakan untuk melakukan sedikit revisi bertahap untuk kebijakan ini dan panduan pengkajian ulang berdasarkan pada saran dan masukan dari uji coba tahunan.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa dalam memenuhi persyaratan kebijakan ini membutuhkan biaya tambahan bagi FIPs, terutama mereka yang diwajibkan untuk menyelesaikan pengkajian resiko dan menyusun rencana kegiatan sosial. FIP sendiri bersifat unik dikarenakan adanya keikutsertaan atau partisipasi sektor swasta dalam mendukung upaya peningkatan perikanan. Sementara itu, pihak pengusaha telah memulai mengutamakan tanggungjawab sosial mereka pada rantai penyuplaian makanan laut (seafood). Akan tetapi, uji tuntas hak asasi manusia masih belum menjadi norma pada seluruh industri makanan laut ini. Untuk itu, FisheryProgress akan bekerja sama dengan the Conservation Alliance untuk Solusi Makanan Laut dalam mendorong pembeli pada semua tingkatan rantai penyuplain guna menjalankan tanggungjawab sosial. Dukungan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang membeli makanan laut dari FIPs membantu FIP dalam memenuhi persyaratan kebijakan ini. Hal ini sama pentingnya dengan tujuan lingkungan yang FIP laksanakan.

Melindungi hak asasi manusia nelayan sangatlah penting

Beberapa tahun ini, investigasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGOs) dan jurnalis telah memberikan pemahaman terhadap pentingnya menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di dunia perikanan. Oleh karena itu, usaha makanan laut (seafood) dunia telah memulai mengambil tindakan dalam upaya menangani resiko pelanggaran hak asasi manusia pada rantai penyuplaian ikan mereka. Pada tahun 2019, Aliansi Konservasi (the Conservation Alliance) untuk Solusi Makanan Laut telah memperbarui [Panduan guna Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan](#) untuk mendorong FIP dalam menangani masalah tanggungjawab sosial. Sekitar 20% dari FIP pada FisheryProgress telah memulai membagikan informasi mengenai berbagai usaha tanggungjawab sosial yang mereka lakukan. FisheryProgress dulunya telah aktif memantau sektor luas konservasi dan tanggungjawab sosialnya, tetapi FisheryProgress masih menunggu keselarasan komunitas sebelum mengambil tindakan.

“Hormat terhadap hak asasi manusia penting pada sektor penangkapan ikan, apabila kita ingin mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan.”

– FIP stakeholder

Tindakan ini mengalami perubahan pada bulan Mei 2019, ketika kami menerima tuduhan tentang pelanggaran hak asasi manusia pada laporan FIP di FisheryProgress. Tuduhan ini menyatakan bahwa FisheryProgress membiarkan pelanggaran hak asasi manusia tidak tertangani dan adanya kelambatan dalam penanganan (a wait-and-see approach) pada tanggungjawab sosial. Tuduhan ini memberikan dampak buruk terhadap kredibilitas FisheriesProgress.

Kebijakan berdasarkan nasehat para ahli serta saran dan masukan stakeholder (pemangku kepentingan)

Kami melaksanakan proses evaluasi dengan berbagai macam stakeholder secara intensif dan inklusif. Yayasan David dan Lucile Packard dan Yayasan Walmart, juga mendukung kami dalam menyusun kebijakan ini, yang berjalan selama hampir lebih dari dua tahun. Hal ini dimulai dengan pertemuan beberapa Komite Penasehat Sosial yang ahli dalam bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, masalah ekonomi dan sosial di dunia perikanan, penerapan FIP, dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR—Corporate Sosial Responsibility) pada rantai penyuplaian makanan laut. Kami sangat bersyukur untuk waktu yang anggota komite berikan dalam pemberian nasehat pada semua aspek kebijakan, tetapi perlu diingat bahwa pengambilan keputusan akhir untuk kebijakan tersebut merupakan tanggungjawab FisheryProgress.

Kami juga melakukan tiga tahapan dalam memperoleh saran dan masukan stakeholder—tahapan pertama pada akhir tahun 2019 untuk mengambil data tentang suhu optimal spesies laut (community temperature), dan dua tahap berikutnya pada tahun 2020 untuk mengumpulkan saran dan masukan pada kebijakan draft asli dan perubahan utama yang diajukan. Kami menggunakan metode survei, panggilan bersama (video call), dan penyampaian langsung ke publik (outreach) berkala untuk melibatkan seratus stakeholder, termasuk pelaku usaha, organisasi non-pemerintah yang bergerak pada hak asasi manusia dan konservasi, dan tiga perempat (75%) FIP yang sekarang ini aktif pada FisheryProgress.

Kebijakan berdasarkan nasehat para ahli serta saran dan masukan stakeholder (pemangku kepentingan)

Kami melaksanakan proses evaluasi dengan berbagai macam stakeholder secara intensif dan inklusif. Yayasan David dan Lucile Packard dan Yayasan Walmart, juga mendukung kami dalam menyusun kebijakan ini, yang berjalan selama hampir lebih dari dua tahun. Hal ini dimulai dengan pertemuan beberapa Komite Penasehat Sosial yang ahli dalam bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, masalah ekonomi dan sosial di dunia perikanan, penerapan FIP, dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR—Corporate Social Responsibility) pada rantai penyuplaian makanan laut. Kami sangat bersyukur untuk waktu yang anggota komite berikan dalam pemberian nasehat pada semua aspek kebijakan, tetapi perlu diingat bahwa pengambilan keputusan akhir untuk kebijakan tersebut merupakan tanggungjawab FisheryProgress.

Kami juga melakukan tiga tahapan dalam memperoleh saran dan masukan stakeholder—tahapan pertama pada akhir tahun 2019 untuk mengambil data tentang suhu optimal spesies laut (community temperature), dan dua tahap berikutnya pada tahun 2020 untuk mengumpulkan saran dan masukan pada kebijakan draft asli dan perubahan utama yang diajukan. Kami menggunakan metode survei, panggilan bersama (video call), dan penyampaian langsung ke publik (outreach) berkala untuk melibatkan seratus stakeholder, termasuk pelaku usaha, organisasi non-pemerintah yang bergerak pada hak asasi manusia dan konservasi, dan tiga perempat (75%) FIP yang sekarang ini aktif pada FisheryProgress.

Kami bertujuan untuk menyusun sebuah kebijakan yang berdampak dan dapat diterapkan

Pada intinya, FisheryProgress berfokus pada peningkatan dan keterbukaan (transparansi). Selama proses ini, kami belajar dari penasehat hak asasi manusia yang mengambil langkah bijak guna upaya peningkatan, sedangkan fokus utama untuk model FIP umumnya tidak digunakan untuk pendekatan dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ketika informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dibuat terbuka untuk umum, ini seringkali mengakibatkan resiko hukum dan reputasi yang membuat pembeli harus berhenti membeli makanan laut daripada melanjutkan keterlibatan mereka dalam upaya peningkatan. Oleh karenanya, masalah seperti ini justru membuat pelanggaran hak asasi manusia berlanjut pada nelayan yang rentan dirugikan oleh pelanggaran HAM. Kami menghadapi dinamika kedua masalah ini ketika mempertimbangkan tata cara penyusunan kebijakan yang akan membantu para nelayan.

FisheryProgress saat ini memiliki 95% FIP dunia yang melapor melalui situs ini. Kami tahu bahwa FIP sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pendanaan yang cukup untuk kegiatan lingkungan mereka. Masalah ini juga diperparah dengan adanya pandemi virus Corona. FIP juga berjalan dengan konteks yang luas dari perikanan artisanal sampai perikanan industri, dimana penangkapan ikan dilakukan dengan tangan dari pantai atau di atas kapal selama beberapa hari atau bulan, pada negara dengan alur kerja resmi yang kuat sampai lemah terhadap hak asasi manusia. Karena FIP akan secara langsung terkena imbas oleh persyaratan kebijakan baru ini, kami harus mempertimbangkan secara seksama tentang bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan di lapang oleh FIP.

Kami sedang memulai dengan sebuah pendekatan berjenjang, dengan tujuan bahwa semua FIP pada akhirnya akan memenuhi standar internasional untuk uji tuntas

Praktek kinerja terbaik internasional atau international best practices yang dijelaskan dengan [Prinsip Panduan PBB pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#) mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia. Kami bergantung sepenuhnya pada prinsip ini untuk menyusun kebijakan. Tujuan jangka panjang kebijakan ini yaitu semua FIP dapat menyelesaikan pengkajian resiko dan menyusun rencana kerja sosial dalam menangani wilayah (bagian) yang paling beresiko pada kegiatan perikanan.

Sebagai awal permulaan, kebijakan kami ini mensyaratkan FIP dengan faktor situasional untuk menyelesaikan pengkajian resiko. Ini dikarenakan FIP ini diketahui rentan mengalami peningkatan resiko tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, FIP ini juga harus membantu menyusun sebuah rencana kerja sosial untuk menangani wilayah (bagian) yang paling beresiko yang teridentifikasi pada saat pengkajian. FIP dapat memilih untuk mengambil langkah-langkah penanganan ini secara sukarela apabila mereka tidak menunjukkan tanda merah (red flag) pada kriteria resiko kebijakan.

Kriteria resiko berfokus pada faktor situasional yang paling sering terjadi pada industri perikanan, termasuk pemindahan tangkapan ikan antar kapal (transshipment), pegawai asing (migran), dan perjalanan menangkap ikan yang lama di laut. Kami memutuskan untuk berfokus pada permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan dua alasan kami: 1) masalah hak asasi manusia pada perikanan industri terdokumentasikan dengan baik dan kriteria untuk mengkaji resiko memberikan informasi yang lebih spesifik dan obyektif dibandingkan dengan kriteria yang ada pada perikanan skala kecil; dan 2) perikanan industri kemungkinan besar memiliki kapasitas teknis dan keuangan yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan kebijakan ini.

Kami menyadari bahwa pelanggaran hak asasi manusia—termasuk tenaga kerja anak dan ikatan hutang—merupakan masalah yang signifikan pada perikanan tangkap skala kecil. Oleh karena itu, semua persyaratan pada kebijakan kami dibentuk untuk semua skala perikanan. Dan kami berkomitmen dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian pada wilayah ini dari waktu ke waktu.

Alur kerja kami untuk mengukur performa sosial adalah Pengkajian Tanggungjawab Sosial

Satu tahapan penting pada pendekatan FisheryProgress yakni mengukur performa FIP dengan standar penilaian tunggal. Untuk performa lingkungan, FisheryProgress menggunakan standar Marine Stewardship Council karena standar ini bersifat menyeluruh dan banyak digunakan pada industri makanan laut, serta dapat diakses oleh semua FIP terlepas apakah mereka ingin memperoleh sertifikasi sebagai tujuan akhir mereka atau tidak.

Kami perlu mengidentifikasi standar penilaian yang sama guna mengkaji performa sosial. Beberapa tahun ini, berbagai standar dan alat atau kaidah penilaian tanggungjawab sosial telah bermunculan, tetapi mereka memiliki perbedaan dari cakupan masalah yang mereka tangani sampai jenis standar perikanan yang diterapkan. Kami mengevaluasi standar dan alat pengkajian yang ada saat ini untuk menentukan apabila standar-standar ini:

- Dapat digunakan untuk mengkaji performa perikanan jenis apapun dari perikanan artisanal sampai industri. Keep pace with the evolution of social responsibility norms across the seafood sector.
- Mencakup semua hal pokok pada masalah hak asasi manusia dan kepegawaian serta masalah sosial dan ekonomi yang dirujuk pada Alur kerja Monterey [Monterey Framework](#).
- Membolehkan FIP untuk menggunakan informasi dari sertifikasi sosial dan audit lainnya untuk mengkaji performa FIP mereka sesuai dengan standar tersebut.

Alat (Kaidah) Pengkajian Tanggungjawab Sosial untuk sektor makanan (SRA—Social Responsibility Assessment Tool) berdasar pada kandungan 18 tentang standar dan alat tanggungjawab sosial untuk membuat satu kumpulan indikator performa yang menyeluruh, masing-masing dengan kriteria resiko dari tinggi, sedang, sampai rendah. SRA mencakup masalah sosial secara sepenuhnya termasuk Monterey Framework, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, kesetaraan, keadilan, mata pencaharian, dan keamanan pangan. SRA dapat digunakan untuk mengkaji resiko sosial di dalam FIP, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wilayah (bagian) yang beresiko tinggi dan sedang, dan peningkatan jejak ketelusuran dari waktu ke waktu. Karena SRA merupakan alat gabungan yang berdasar pada kandungan standar lainnya, FIP dapat memetakan dengan mudah data audit untuk indikator pada pedoman tolak ukur (benchmarking guides) yang sedang disusun oleh Elevate, yang sekarang ini bertanggungjawab dalam mengelola SRA.

Kami ingin bekerja dengan Anda untuk menguatkan kebijakan ini dari waktu ke waktu

Kebijakan ini merupakan sebuah langkah awal. Pada tahun 2024, kami akan melakukan proses revisi dengan melibatkan berbagai macam stakeholder secara transparan untuk:

- Memasukan apa yang kami pelajari dari tiga tahun pertama penerapan kebijakan.
- Menjaga kinerja dalam merespon perubahan pada norma tanggungjawab sosial pada sektor makanan laut.
- Menguatkan persyaratan kami agar dapat mengatasi masalah tenaga kerja anak, ikatan hutang dan masalah hak asasi dan ketenagakerjaan lainnya yang ada pada nelayan skala kecil, untuk mendorong tujuan jangka panjang bagi semua FIP yang menyelesaikan pengkajian ulang resiko dan membentuk rencana kerja sosial untuk mengatasi wilayah (bagian) yang beresiko tinggi.

Kami akan menyusun rencana pemantauan atau monitoring dan evaluasi pada akhir tahun 2021 dan melaporkan secara terbuka ke seluruh masyarakat setiap tahunnya tentang tolak ukur yang ada pada rencana kerja sosial tersebut. Rencana ini meliputi evaluasi apakah kriteria resiko yang kami buat berfungsi sebagaimana mestinya guna mengidentifikasi FIP dengan peningkatan resiko kerja paksa dan perdagangan manusia. Kami juga akan bekerjasama dengan mitra kerja kami untuk mendorong dan mendanai perikanan skala kecil yang ingin melakukan pengkajian ulang resiko tersebut, sehingga kami pada akhirnya dapat membuat kriteria resiko yang sesuai dengan kegiatan perikanan ini.

Untuk saat ini, kami mengharapkan saran dan masukan Anda mengenai kebijakan ini setiap waktunya. Kami sangat percaya bahwa memasukan indikator tanggungjawab sosial pada FisheryProgress merupakan langkah nyata untuk mencapai industri makanan laut dunia yang

berkelanjutan. Namun, kami juga menyadari bahwa kebijakan ini mensyaratkan FIP untuk melakukan perubahan tentang bagaimana cara mereka bekerja. Hal ini akan selalu terasa rumit di awal penerapan tetapi seiring berjalannya waktu kami yakin kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik. Kami menanti diskusi selanjutnya dengan FIP dan pembeli makanan laut bersamaan dengan usaha kami untuk mencapai tujuan tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perikanan di seluruh penjuru dunia.

Sincerely,

The FisheryProgress Team